



**RILIS**

**KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) RESES KOMISI XIII DPR RI  
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025  
KE KANTOR WILAYAH (KANWIL) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)  
6-10 DESEMBER 2024**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kini difokuskan pada pengelolaan imigrasi secara terintegrasi dan pembinaan narapidana (WBP) agar setelah bebas mereka sebagai bagian dari SDM bangsa dapat tetap melakukan pekerjaannya di masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memuat reformasi sistem pidana untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, pembinaan, dan perlindungan HAM. KUHP baru juga memperkenalkan pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana bersyarat, yang diharapkan dapat mengurangi overkapasitas di Lapas serta memberikan pilihan pidana yang lebih humanis sehingga setelah selesai menjalankan masa hukumannya WBP tetap dapat bekerja dengan layak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Melihat berbagai persoalan tersebut, Komisi XIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker) masa reses **ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 6-10 Desember 2024**, yang dipimpin oleh Rinto Subekti, S.E.,M.M./ Wakil Ketua Komisi XIII Fraksi Partai Demokrat.

Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesiapan keimigrasian dan pemasarakatan untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dan perubahan kelembagaan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung pencapaian reformasi dan transformasi kelembagaan keimigrasian dan pemasarakatan yang lebih efektif, efisien, dan berdaya guna bagi SDM bangsa. Selain itu, perbaikan sistem keimigrasian serta sistem pemasarakatan dan pembinaan WBP dengan tetap memenuhi HAM dan menjamin reintegrasi sosial sehingga setelah bebas mampu mendapatkan pekerjaan kembali.

Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum menciptakan kondisi sosial yang aman dan terlindungi bagi masyarakat. Keadilan dan kepastian hukum melalui reformasi dan transformasi ini mendorong para WBP untuk memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Melalui kunjungan ini, DPR RI menerima aspirasi mendukung agar dapat memastikan bahwa Lapas dan Keimigrasian mampu menjalankan peran barunya dengan optimal.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII, Rinto Subekti dengan pemaparan materi diskusi oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, rapat juga

dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Chicco Akhmad Muttakim (Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian), Lilik Sujandi (Direktur Kepatuhan Internal), para Kepala Devisi se-Sumatera Selatan, Kepala UPT Imigrasi se Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala UPT Lapas se Provinsi Sumatera Selatan.

Rapat dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala UPT Imigrasi Sumatera Utara, beserta jajaran Keimigrasian dan Pemasarakatan, menghasilkan beberapa poin penting yakni :

1. Lembaga Pemasarakatan (Lapas) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami *overcapacity* sebanyak 122%. Kanwil Kumham Provinsi Sumatera Selatan agar melakukan perbaikan kedepan sesuai dengan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dengan mendorong pembuatan Lapas baru.
2. Dirjen Pemasarakatan harus konsisten memberikan hak-hak dasar warga binaan seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti jelang bebas. Kanwil Kumham Sumsel khususnya terkait pembinaan warga binaan menjadi pelopor dalam melaksanakan program ketahanan pangan Presiden dengan mengelola lahan kosong.
3. Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kanwil Kumham Sumatera Selatan kenaikan PNBP sebesar 200%. Perlu peningkatan dan terobosan dalam pengelolaan keimigrasian khususnya pembuatan Paspor oleh karena itu, Kementerian perlu meningkatkan anggaran khususnya untuk pelayanan Keimigrasian di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Komisi XIII DPR RI mendorong untuk menguatkan kembali adanya Koperasi Induk yang ada di Lapas.
5. Terdapat 3 hal yang menjadi kendala dalam manajemen pemasarakatan maupun keimigrasian di Sumatera Selatan, yaitu jumlah SDM yang tidak memadai, kurangnya sarana dan prasarana, belum optimalnya *Restorative Justice*.
6. Kanwil Kumham Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Lapas diseluruh Provinsi Sumatera Selatan agar tetap meneruskan Upaya pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan. Seluruh Lapas di Sumatera Selatan kedepan terus melakukan berbagai program inisiasi kerja sama dengan pihak swasta sehingga proses reintegrasi dan kemandirian finansial WBP Ketika selesai menjalankan masa hukumnya.

Setelah Rapat dengan Kepala Kanwil Hukum dan HAM, Tim Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Unit Pelayanan Paspor Imigrasi dan kunjungan ke Lapas Mata Merah dan Rutan Perempuan. Dalam kunjungan ke Lapas Mata Merah dan Rutan Perempuan tim Komisi XIII meninjau langsung kegiatan yang dilakukan terhadap pembinaan narapidana yang meliputi: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lapas dan Rutan terus mengembangkan program keterampilan kerja untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. Untuk itu, Lapas dan Rutan menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung layanan pemasarakatan, pembinaan kesadaran beragama, pembinaan keterampilan dan pembinaan kesehatan jasmani.

**Palembang, 9 Desember 2024**  
**Tim Kunker Reses Komisi XIII DPR RI ke Sumatera Selatan.**

